



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIT KERJA : UNIVERSITAS BRAWIJAYA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : TRI ASTOTO KURNIAWAN
2. Jabatan : DEKAN
3. NHK : 688362

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 4.039.463.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 2.255 m²/100 m² di KAB / KOTA KOTA BATU , Rp. 2.668.785.000
2. Tanah Seluas 247 m² di KAB / KOTA KOTA MALANG , Rp. 314.678.000
3. Tanah Seluas 6.600 m² di KAB / KOTA JEMBER, Rp. 1.056.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 45.500.000

1. MOTOR, YAMAHA 2PY/SPM. SOLO Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 20.500.000
2. MOTOR, YAMAHA UE11/SPD. MOTOR Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
3. MOTOR, HONDA E1F02N11M2/SPD MTR SOLO Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 13.250.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 29.070.970

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 4.127.283.970

III. HUTANG Rp. 170.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 3.957.283.970



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.